

Kebijakan Tidak Populis dan Konflik Kekerasan

Oleh: Novri Susan

Pengajar di Jurusan Sosiologi FISIP Unair Surabaya dan
Peneliti di Pusat Kajian Transformasi Sosial (PsaTS) UNAIR Surabaya

Kericuhan pecah dalam masyarakat karena bagi warga miskin BLT (Bantuan Langsung Tunai) dari dana kompensasi kenaikan BBM tidak terdistribusikan dengan adil. Warga miskin memprotes pengurus setempat, seperti ketua RT atau kepala desa. Aksi protes juga diwarnai aksi teror dan kekerasan terhadap para pengurus lokal. Akibatnya di beberapa daerah, seperti dilansir beberapa media cetak, ada pengurus yang bunuh diri, mengungsi ke tempat lain untuk menghindari ancaman, dan ada ketua RT maupun kepala desa yang dibunuh oleh warga karena tidak kebagian jatah dana kompensasi. Situasi ini kemungkinan menjadi bola salju bagi terciptanya konflik sosial di tubuh masyarakat miskin itu sendiri. Gejala kekerasan sosial tersebut tidak lepas dari lahirnya kebijakan tidak populis pemerintah SBY. Sesungguhnya, mengapa pemerintahan SBY melahirkan kebijakan tidak populis ini?

Akar Masalah

Pemerintah dengan alasan kenaikan harga minyak internasional yang mencapai 70\$ per barrel dan ingin mengalihkan subsidi BBM ke rakyat miskin langsung kemudian mengeluarkan kebijakan menaikkan harga BBM mencapai rata-rata 120%. Pemerintahan sebelum SBY-JK sebenarnya juga menaikkan harga BBM akan tetapi hanya berkisar dari 20%-30%. Keberanian pemerintahan saat ini dalam mengeluarkan kebijakan yang tidak populis berkaitan dengan BBM sesungguhnya dipengaruhi oleh beberapa faktor:

Pertama, desakan kekuatan kapitalisme global yang mendesakkan sistem ekonomi pasar bebas. Kapitalisme global yang secara organisasional adalah TNCs (Trans National Corporations) dan lembaga-lembaga ekonomi kapitalis (termasuk IMF dan Bank Dunia), mendesak dilepaskannya campur tangan negara dalam persoalan pasar (Fakih, 2003). Negara harus membiarkan logika pasar berjalan secara bebas, termasuk dalam menentukan harga-harga barang perdagangan atau komoditas. Dampaknya cukup jelas, negara dilarang memberi subsidi pada BBM sebagai komoditas agar pasar bisa bermain leluasa. Jadi pencabutan subsidi BBM merupakan desakan kapitalisme global.

Kedua, tim ekonomi KIB (Kabinet Indonesia Bersatu) yang lebih sibuk melayani kepentingan-kepentingan kapitalisme global daripada melayani rakyat kecil adalah faktor dari munculnya kebijakan tidak populis. Artinya, tim ekonomi pemerintahan sebenarnya adalah penyokong dari sistem pasar bebas yang dibawa kapitalisme global.

Kita bisa melihat pada PP 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. PP ini sangat memungkinkan terjadinya pengusuran atas nama kepentingan negara yang seringkali kelompok-kelompok pengusaha bermain di belakangnya. Contoh lain adalah UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang memberi peluang luas pada TNCs untuk menjadikan air sebagai komoditas yang diperjualbelikan, dan bukan lagi sebagai kekayaan alam yang dimanfaatkan secara luas untuk kesejahteraan rakyat.

Tidak kalah penting adalah tim ekonomi KIB tidak mampu menjawab pengangguran yang semakin meningkat yang berdampak pada membengkaknya jumlah rakyat miskin dari 30 juta menjadi 40 juta lebih orang miskin. Tingkat investasi yang menurun semenjak pemerintah SBY dengan tim ekonominya menjalankan roda

pemerintahan dan menurunnya nilai rupiah terhadap dollar Amerika. Kenyataan ini juga menjadi bukti bahwa tim ekonomi KIB tidak berjalan efektif dalam satu tahun terakhir.

Jalan Keluar

Situasi sosial masyarakat miskin bisa jadi akan semakin parah, dari kekerasan yang sifatnya kekecewaan personal bisa berubah menjadi kekerasan yang meluas ke isu-isu agama dan etnis. Hal ini mengingatkan karakter masyarakat Indonesia yang berkarakter komunal primordial. Sebagaimana konflik kekerasan yang terjadi di Ambon dan Sampit yang berawal dari krisis ekonomi. Merujuk karya klasik Lewis Coser (*The Function of Conflict*, 1956), konflik riil dengan permasalahan yang mudah didefinisikan isu-isunya mampu berubah menjadi konflik tidak nyata dengan ciri semakin menjauhnya kesadaran pihak yang terlibat dari isu yang sebenarnya sehingga konflik tak mudah terselesaikan. Kemungkinan ini perlu mendapatkan perhatian presiden SBY dengan cara mengeluarkan kebijakan yang populis.

Beberapa langkah penting perlu dilakukan SBY agar bisa mengeluarkan kebijakan populis saat ini, setidaknya ada tiga langkah yang perlu diambil; *Pertama*, langkah yang mendesak adalah menyusun ulang (resuffle) kabinet saat ini dengan kabinet baru yang lebih mempunyai komitmen kerakyatan. Tim ekonomi pemerintah saat ini bisa dinilai kurang mempunyai komitmen melayani rakyat.

Kedua, agar pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan populis adalah dengan mendorong fungsi deliberatif lembaga politik negara, baik dewan perwakilan maupun eksekutif, dari pusat sampai daerah untuk menciptakan emansipasi politik rakyat dalam melahirkan suatu kebijakan. Kenyataannya fungsi deliberatif yang semestinya subur di era demokrasi saat ini ternyata belum menjadi pilihan pemerintah untuk melahirkan

kebijakan-kebijakan yang populis. Pemerintah harus benar-benar mampu mendorong fungsi deliberatif lembaga politik negara sehingga pemerintah bukan hanya sekedar mensosialisasikan kebijakan tetapi juga mendiskusikannya dengan rakyat. Keberadaan lembaga-lembaga non pemerintahan seperti LSM, media dan lembaga keagamaan bisa menjadi partner dalam mendorong fungsi deliberatif lembaga politik negara.

Ketiga adalah mengembalikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai ruh dalam melaksanakan roda pemerintahan. Pancasila dan UUD 1945 harus menjadi rujukan pertama dalam menjalankan fungsi pemerintahan karena di dalam kedua sumber hukum itulah rakyat mendapatkan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak sebagai pemilik syah negeri ini.

Kebijakan yang populis tidak perlu dikaitkan dengan kompetisi pemilihan presiden 2009 tetapi lebih jauh dari itu adalah untuk menghapus beban penderitaan rakyat. Jangan sampai rakyat mengalami kelaparan, mengalami permusuhan horisontal karena rebutan jatah dana kompensasi dan lebih parah lagi terjebak dalam konflik kekerasan yang bisa pecah dari situasi serba sulit saat ini.